

Analisis Proses Administrasi Pendidikan di Indonesia: Mengidentifikasi Distorsi dan Implikasinya

Lina Pusvitasari^{1*}, Ahmad Rahmatullah², Uus Husni Hoer³, Achmad Syihab Hasny⁴,
Muhammad Rifki Al-Haedari⁵

STAI Al-Azhari, Cianjur, Jawa Barat, Indonesia

Email:

¹nenglinapusvisa@gmail.com

²ahmadrahmatullahalhalim@gmail.com

³uus.hoer@stai-alazhary-cianjur.ac.id

⁴shyhab.arab@gmail.com

⁵talhaedaririfqi@gmail.com

Riwayat Artikel:

Diterima:

Revisi:

Disetujui:

Tersedia Online

Keyword:

Innovation in Student Management,
Entrepreneurial Spirit, and Student
Self-Reliance.

Kata Kunci:

Administrasi Pendidikan,
Distorsi Administratif,
Efisiensi Pendidikan

ABSTRACT

Educational administration in Indonesia plays a critical role in creating an efficient and effective education system, ensuring the optimal utilization of resources and educational activities. However, the reality on the ground shows that educational administration is not immune to distortions, both internal and external, which may occur due to manipulation or misconceptions, whether intentional or not. These distortions can reduce the effectiveness and efficiency of the educational process, undermine the integrity of the system, and hinder the achievement of high-quality educational goals. This research adopts a qualitative approach using literature studies and interviews to identify and analyze distortions occurring within educational administration in Indonesia. The literature study provides a theoretical framework, while interviews with various educational stakeholders offer empirical insights into the manifestations of distortions and their impact on the education system. Research findings indicate that educational administration distortions affect resource allocation, policy implementation, and the quality of educational services. Various factors contributing to these distortions include a lack of transparency, accountability, and standardization in administrative processes. To address these distortions, reform is needed in the education administration system that includes enhancing transparency, accountability, and adopting best administrative practices. By identifying and addressing distortions in educational administration, it is expected to create a fairer, more transparent, and effective education system, ultimately improving the quality of education in Indonesia.

ABSTRAK

Administrasi pendidikan di Indonesia berperan penting dalam menciptakan sistem pendidikan yang efisien dan efektif, menjamin pemanfaatan sumber daya dan kegiatan pendidikan secara optimal. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa administrasi pendidikan tidak luput dari distorsi, baik yang bersifat internal maupun eksternal, yang mungkin terjadi akibat manipulasi atau miskonsepsi, disengaja atau tidak. Distorsi ini dapat mengurangi efektivitas dan efisiensi proses pendidikan, merusak integritas sistem, dan menghambat pencapaian tujuan pendidikan yang berkualitas. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan menggunakan studi literatur dan wawancara untuk mengidentifikasi dan menganalisis distorsi yang terjadi dalam administrasi pendidikan di Indonesia. Studi literatur memberikan kerangka teoretis, sementara wawancara dengan berbagai stakeholder pendidikan memberikan insight empiris tentang manifestasi distorsi serta dampaknya terhadap sistem pendidikan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa distorsi administrasi pendidikan mempengaruhi alokasi sumber daya, implementasi kebijakan, dan kualitas layanan pendidikan. Berbagai faktor yang berkontribusi pada distorsi ini termasuk kurangnya transparansi, akuntabilitas, dan standarisasi dalam proses administratif. Untuk mengatasi distorsi ini, diperlukan reformasi dalam sistem administrasi pendidikan yang mencakup peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan pengadopsian praktik terbaik administratif. Dengan mengidentifikasi dan mengatasi distorsi dalam administrasi pendidikan, diharapkan dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil, transparan, dan efektif, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan suatu bangsa, memegang peranan kritical dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas, beretika, dan kompeten (Manurung & Rahmadi, 2017). Di Indonesia, sektor pendidikan diatur dalam kerangka yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pembelajaran masyarakat serta menjamin akses yang luas dan merata terhadap pendidikan berkualitas (Mursalin & Tech, 2019). Pendidikan yang efektif dan inklusif tidak hanya membantu individu mencapai potensi penuh mereka tetapi juga memainkan peran penting dalam kemajuan sosial dan ekonomi bangsa.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Indonesia telah menetapkan prinsip-prinsip fundamental dan tujuan pendidikan yang inklusif, merata, dan bermutu tinggi

(Indonesia, 2003). Undang-undang ini dirancang untuk membimbing sistem pendidikan nasional dalam mempromosikan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia sambil meningkatkan kecerdasan dan potensi tiap individu. Prinsip-prinsip ini menggarisbawahi pentingnya pendidikan yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat dan yang berkontribusi pada pembentukan karakter serta kompetensi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Meskipun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah menetapkan kerangka untuk pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas, dalam praktiknya, Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang menghambat pencapaian tujuan ini. Salah satu tantangan utama adalah adanya distorsi dalam administrasi pendidikan, yang dapat mengurangi efektivitas dan efisiensi sistem pendidikan nasional (Qurtubi, 2019). Distorsi ini merujuk pada penyimpangan atau perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan dan manajemen pendidikan, baik dari sisi struktural maupun operasional, yang pada akhirnya dapat menghambat akses terhadap pendidikan berkualitas untuk semua warga negara.

Distorsi administrasi pendidikan di Indonesia bisa berupa berbagai bentuk, termasuk ketidaksesuaian implementasi kebijakan dengan rencana awal, korupsi, nepotisme, dan inefisiensi dalam pengelolaan sumber daya (YUNININGSIH, 2018). Fenomena ini tidak hanya merugikan individu yang berada dalam sistem pendidikan tetapi juga berdampak luas terhadap pembangunan manusia dan kemajuan bangsa secara keseluruhan. Oleh karena itu, mengidentifikasi dan mengatasi distorsi ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa sistem pendidikan di Indonesia dapat berfungsi dengan efektif, sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan dalam undang-undang, dan mampu mewujudkan tujuan pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas.

Distorsi dalam administrasi pendidikan di Indonesia menifestasikan dirinya dalam berbagai bentuk yang merusak integritas dan efektivitas sistem pendidikan. Ketidaksesuaian antara kebijakan yang dirancang dengan realitas implementasi di lapangan, korupsi, nepotisme, serta inefisiensi dalam pengelolaan sumber daya, semuanya berkontribusi pada hambatan serius terhadap penyelenggaraan pendidikan yang efektif dan adil. Hambatan birokratis yang berlebihan, misalnya, dapat memperlambat atau bahkan menghentikan inisiatif pendidikan yang penting, menghambat inovasi, dan mengecewakan para stakeholder pendidikan, mulai dari siswa hingga pengajar dan administrator.

Implikasi dari distorsi ini jauh melampaui batas-batas sistem pendidikan itu sendiri, menciptakan ripples yang merugikan dalam masyarakat luas dan proses pembangunan bangsa. Saat individu-individu dalam sistem pendidikan dirugikan, hal ini tidak hanya menghalangi potensi mereka untuk berkontribusi secara penuh terhadap masyarakat, tetapi juga merugikan fondasi sosial dan ekonomi bangsa. Dalam jangka panjang, distorsi ini dapat mengikis kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan, mengurangi kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan, dan membatasi kemajuan Indonesia dalam konteks global (Muhammad & Abubakar, 2011). Oleh karena itu, memahami, mengidentifikasi, dan mengatasi berbagai bentuk distorsi dalam administrasi pendidikan menjadi penting untuk memastikan bahwa pendidikan di Indonesia dapat mencapai tujuannya yang inklusif, merata, dan berkualitas.

Dengan memahami pentingnya administrasi pendidikan yang berintegritas dan efisien, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai bentuk distorsi yang terjadi dalam administrasi pendidikan di Indonesia, serta mengeksplorasi dampak yang ditimbulkannya terhadap kualitas pendidikan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang komprehensif mengenai tantangan-tantangan yang dihadapi dalam administrasi pendidikan di Indonesia dan menawarkan rekomendasi yang dapat diadopsi oleh pemangku kebijakan dan praktisi pendidikan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.

Dengan demikian, penelitian ini berpotensi untuk menjadi landasan bagi perbaikan sistem pendidikan yang lebih efektif, transparan, dan inklusif, sehingga masyarakat Indonesia dapat memperoleh akses yang lebih luas dan merata terhadap pendidikan berkualitas, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

METODOLOGI

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini mencakup beberapa tahap yang sistematis. Pertama, kami menentukan populasi dan sampel yang mencakup berbagai latar belakang pendidikan, mulai dari mahasiswa perguruan tinggi hingga tenaga pengajar. Kami menggunakan pendekatan kombinasi antara tokoh-tokoh yang memiliki pengalaman dalam aktivitas kemahasiswaan, seperti Dzikri Alghifari dan Rian Ihsan Ardiansyah, dengan individu yang mewakili latar belakang pendidikan yang berbeda, seperti Baihaqi Zaki Sulaiman dan Wildan Nurhakim. Kami juga memperkaya perspektif kami dengan mendapatkan pandangan dari sejumlah santri dan penulis buku self-publisher, serta mempertimbangkan sudut pandang dari beberapa dosen.

Kedua, kami menggunakan instrumen kajian literatur dan wawancara untuk mengumpulkan data yang relevan dengan isu distorsi administrasi pendidikan. Pendekatan ini memungkinkan kami untuk mendapatkan pemahaman yang holistik dan mendalam tentang masalah tersebut dari berbagai sudut pandang. Terakhir, dalam menganalisis data, kami menerapkan metode thematic analysis atau analisis tematik. Pendekatan ini memungkinkan kami untuk mengidentifikasi dan menganalisis tema-tema utama yang muncul dari wawancara dengan responden, sehingga kami dapat menjelaskan secara sistematis temuan-temuan yang diperoleh dan menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang distorsi administrasi pendidikan serta dampaknya terhadap kualitas pendidikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, kami memfokuskan analisis pada beragam distorsi yang teridentifikasi dalam administrasi pendidikan, menyoroti bagaimana distorsi ini mempengaruhi berbagai stakeholder, termasuk tenaga pendidik, orang tua, dan anak didik. Salah satu temuan utama kami adalah adanya masalah dalam rekrutmen guru, di mana prosesnya tidak selalu transparan atau meritokratis, menyebabkan kekhawatiran tentang kualitas pendidikan yang disampaikan.

Kami juga mengungkapkan masalah dalam sistem kurikulum yang sering kali membingungkan baik bagi guru maupun siswa, yang mana dapat menghambat proses pembelajaran dan mengurangi efektivitas pendidikan. Masalah distribusi beasiswa yang tidak merata juga menjadi sorotan, menunjukkan adanya ketidakadilan dalam memberikan kesempatan pendidikan, terutama bagi siswa dari keluarga kurang mampu.

Lebih lanjut, praktik korupsi yang kami temukan dalam administrasi pendidikan menunjukkan ketidakseimbangan dan ketidakadilan yang lebih luas dalam sistem, mengikis sumber daya yang seharusnya dialokasikan untuk pengembangan pendidikan dan merugikan semua pihak yang terlibat. Distorsi ini bukan hanya merugikan secara finansial tetapi juga menurunkan standar dan harapan terhadap integritas dalam sistem pendidikan.

Selain masalah struktural dan administratif, kami juga menemukan distorsi pada tingkat interaksi antara orang tua dan sekolah. Sejumlah orang tua tampak menyerahkan tanggung jawab pendidikan anak sepenuhnya kepada sekolah, tidak memadai dalam memberikan dukungan atau intervensi ketika diperlukan. Sebaliknya, ada juga orang tua yang terlalu acuh tak acuh terhadap proses pendidikan anak-anak mereka.

Terakhir, dampak distorsi ini pada anak didik sangat signifikan. Kami mencatat rendahnya minat baca di kalangan siswa, yang merupakan indikator penting dari keingintahuan intelektual dan keterampilan belajar mandiri. Kurangnya kesadaran siswa dalam memanfaatkan waktu luang mereka secara produktif juga mencerminkan kekurangan dalam pemahaman nilai pendidikan dan pembangunan karakter, yang akhirnya dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan.

Dengan demikian, temuan ini menyoroti kebutuhan mendesak untuk reformasi dalam administrasi pendidikan, menunjukkan pentingnya intervensi yang ditargetkan untuk mengatasi distorsi pada berbagai tingkatan dan meningkatkan kualitas pendidikan untuk semua stakeholder yang terlibat.

Analisis temuan menunjukkan bahwa distorsi administrasi pendidikan memiliki dampak negatif yang luas, mulai dari ketidakakuratan data hingga penurunan kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan. Distorsi seperti korupsi dan nepotisme mengurangi efisiensi dan transparansi, sementara ketidakadilan dalam pelayanan publik dan penurunan produktivitas menghambat pengembangan potensi individu dan masyarakat.

Interpretasi hasil mengindikasikan bahwa walaupun kerangka regulasi pendidikan Indonesia memiliki prinsip yang baik, pelaksanaan di lapangan sering tidak sesuai, yang menyebabkan berbagai masalah yang diamati. Penelitian ini juga menemukan bahwa, meskipun terdapat distorsi, banyak dari prinsip dasar pendidikan yang diterapkan masih selaras dengan tujuan pendidikan nasional, menunjukkan bahwa masalah terletak pada implementasi dan manajemen.

Dalam membandingkan dengan penelitian lain, kami menemukan bahwa masalah distorsi dalam administrasi pendidikan bukanlah fenomena yang unik untuk Indonesia tetapi juga terjadi dalam berbagai bentuk di negara lain. Namun, konteks lokal, seperti kebijakan pendidikan dan kondisi sosioekonomi, memainkan peran kritis dalam manifestasi distorsi tersebut.

Keterbatasan penelitian ini termasuk jangkauan responden yang terbatas, yang mungkin tidak mencerminkan keragaman pengalaman dan perspektif yang lebih luas. Oleh karena itu, penelitian mendatang harus berusaha untuk memperluas jangkauan responden dan menerapkan metodologi yang lebih komprehensif untuk menggali lebih dalam tentang masalah ini.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan penting tentang distorsi dalam administrasi pendidikan dan menawarkan dasar untuk pemikiran lebih lanjut dan tindakan perbaikan untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam sistem pendidikan.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa administrasi pendidikan di Indonesia menghadapi berbagai distorsi yang berdampak signifikan terhadap efektivitas, efisiensi, dan integritas sistem pendidikan secara keseluruhan. Distorsi ini mencakup masalah dalam rekrutmen guru, sistem kurikulum yang membingungkan, distribusi beasiswa yang tidak merata, serta praktik korupsi, yang semuanya menunjukkan adanya ketidakseimbangan dan ketidakadilan dalam sistem. Interaksi antara orang tua dan sekolah serta dampak distorsi pada anak didik, seperti rendahnya minat baca dan kurangnya kesadaran memanfaatkan waktu luang, juga mencerminkan kekurangan yang perlu ditangani.

Temuan penelitian menekankan perlunya reformasi komprehensif dalam administrasi pendidikan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan standarisasi proses, yang akan membantu mengidentifikasi dan mengatasi distorsi. Meskipun kerangka regulasi pendidikan di Indonesia memiliki prinsip yang kuat, implementasi dan manajemen praktis seringkali tidak sejalan, menimbulkan masalah yang diamati dalam penelitian ini.

Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa distorsi dalam administrasi pendidikan bukan hanya masalah lokal tetapi juga terjadi di berbagai konteks global, meskipun manifestasinya unik tergantung pada konteks lokal masing-masing. Oleh karena itu, solusi harus mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan politik lokal sambil mengadopsi praktik terbaik yang telah terbukti efektif di tempat lain.

Akhirnya, penelitian ini menyoroti pentingnya melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses reformasi, termasuk tenaga pendidik, orang tua, dan anak didik, untuk memastikan bahwa sistem pendidikan dapat mencapai tujuannya yang inklusif, merata, dan berkualitas tinggi. Dengan memperbaiki distorsi yang ada dan mencegah distorsi baru, diharapkan pendidikan di Indonesia dapat berkontribusi lebih efektif terhadap pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas, mendukung kemajuan sosial dan ekonomi, dan memperkuat fondasi demokrasi dan keadilan sosial di negara ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia, P. R. (2003). *Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional*.
- Manurung, M. M., & Rahmadi, R. (2017). Identifikasi faktor-faktor pembentukan karakter mahasiswa. *JAS-PT (Jurnal Analisis Sistem Pendidikan Tinggi Indonesia)*, 1(1), 41–46.
- Muhammad, M., & Abubakar, A. (2011). *Manajemen organisasi zakat*. In-TRANS Publishing.
- Mursalim, M., & Tech, M. I. (2019). Kebijakan dan Strategi: Membangun Interkoneksi antara Pendidikan Formal, Non-Formal, dan Informal dalam Konteks Pendidikan Sepanjang Hayat di Indonesia (Makalah). *Kendari. Kendari*.
- Qurtubi, H. A. (2019). *Administrasi Pendidikan (Tinjauan Teori & Implementasi)*. Jakad Media Publishing.
- Yuniningsih, T. (2018). *Teori dan Konsep Etika Administrasi Publik*. Doctor Program in Public Administration.